

Indonesia di Tengah Globalisasi Baru

Menata Ekonomi Masa Depan yang Tangguh dan Inklusif

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



1 1. Apa itu Globalisasi Baru?

Globalisasi baru adalah fase ekonomi dunia yang ditandai oleh fragmentasi geopolitik, keamanan rantai pasok, digitalisasi, AI, transisi energi, standar lingkungan, dan persaingan industri yang semakin strategis.



Perdagangan tetap terbuka, tetapi lebih politis



Rantai pasok: dari efisiensi ke ketahanan



AI dan ekonomi digital jadi motor baru



Transisi energi mendorong mineral kritis



Standar ESG dan keberlanjutan makin penting

2 2. Posisi Indonesia Saat Ini



Pertumbuhan Indonesia:
4,7% (2026) | 5,0% (2027)
– Proyeksi OECD



Impor Jan–Apr 2026:
US\$86,51 miliar



Ekspor Jan–Apr 2026:
US\$92,15 miliar



Surplus perdagangan:
US\$5,64 miliar



Populasi besar, pasar domestik luas, anggota G20 & kekuatan utama ASEAN

3 3. Peluang Strategis bagi Indonesia



A. Hilirisasi & nilai tambah nikel, sawit, agroindustri, perikanan



B. ASEAN sebagai basis pertumbuhan integrasi kawasan dan relokasi investasi



C. Ekonomi digital & AI produktivitas, layanan publik, inovasi



D. Transisi energi panas bumi, surya, hidro, kendaraan listrik



E. Pasar domestik besar konsumsi, kelas menengah, skala ekonomi



F. Posisi geostrategis Indo-Pasifik logistik, perdagangan, diplomasi ekonomi

4 4. Risiko dan Tantangan



1 Fragmentasi geopolitik dan proteksionisme



4 Ketimpangan wilayah dan informalitas tenaga kerja



2 Ketergantungan pada komoditas primer



5 Tekanan pangan, energi, dan perubahan iklim



3 Kesenjangan digital dan kualitas SDM



6 Standar global yang makin ketat (ESG, EUDR, traceability)

5 5. Pilar Ekonomi Masa Depan yang Tangguh dan Inklusif



1 Keterbukaan Strategis terbuka, tetapi selektif dan berorientasi nasional



2 Industrialisasi Bernilai Tambah dari bahan mentah ke produk berteknologi



3 SDM Adaptif pendidikan, vokasi, reskilling, literasi digital



Digitalisasi Inklusif akses internet, UMKM digital, AI untuk publik



Ketahanan Pangan & Energi stabilitas pasokan dan transisi hijau



Tata Kelola Demokratis kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas

6 6. Agenda Kebijakan Prioritas

- ✓ 1 Perkuat hilirisasi yang berbasis transfer teknologi
- ✓ 2 Tingkatkan kualitas pendidikan, vokasi, dan riset
- ✓ 2 Dorong UMKM naik kelas ke rantai nilai nasional dan global
- ✓ 4 Bangun infrastruktur fisik dan digital yang merata
- ✓ 5 Percepat energi terbarukan dan efisiensi subsidi
- ✓ 6 Perkuat diplomasi ekonomi dan daya saing ASEAN

7 7. Inklusi: Siapa yang Harus Mendapat Manfaat?

Globalisasi baru harus memperkuat kesejahteraan rakyat, bukan hanya pertumbuhan statistik. Manfaatnya harus dirasakan oleh UMKM, pekerja, petani, nelayan, perempuan, generasi muda, dan daerah tertinggal.



Petani



Pekerja



Perempuan



Generasi Muda



UMKM



Nelayan & Masyarakat Pesisir



Daerah Tertinggal & Indonesia Timur



KESIMPULAN

Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi masa depan bila mampu memadukan keterbukaan, ketahanan, produktivitas, inklusi, dan keberlanjutan. Globalisasi baru menuntut ekonomi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga adil, adaptif, dan berdaulat.



*Rudy C Tarumingkeng: Indonesia di Tengah Globalisasi Baru - Menata
Ekonomi Masa Depan yang Tangguh dan Inklusif*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

25 Juni 2026

INDONESIA DI TENGAH GLOBALISASI BARU: MENATA EKONOMI MASA DEPAN YANG TANGGUH DAN INKLUSIF

Abstrak

Globalisasi abad ke-21 sedang mengalami perubahan mendasar. Jika globalisasi lama ditandai oleh liberalisasi perdagangan, perluasan rantai nilai global, efisiensi biaya, mobilitas modal, dan integrasi pasar yang relatif optimistis, maka globalisasi baru ditandai oleh fragmentasi geopolitik, proteksionisme selektif, perang teknologi, keamanan rantai pasok, transisi energi, ekonomi digital, kecerdasan buatan, serta tuntutan keberlanjutan lingkungan. Indonesia berada di tengah perubahan besar ini. Sebagai negara besar berpenduduk hampir 290 juta jiwa, anggota G20, kekuatan utama ASEAN, pemilik sumber daya alam strategis, sekaligus pasar domestik yang luas, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di Indo-Pasifik. Namun peluang tersebut tidak otomatis menjadi kemajuan. Globalisasi baru membawa risiko: tekanan harga energi dan pangan, perlambatan perdagangan dunia, ketergantungan pada ekspor komoditas, kesenjangan digital, ketimpangan wilayah, informalitas tenaga kerja, dan tuntutan standar lingkungan global yang semakin ketat.

Artikel ini membahas bagaimana Indonesia dapat menata ekonomi masa depan yang tangguh dan inklusif di tengah globalisasi baru. Data mutakhir

menunjukkan bahwa pertumbuhan global diproyeksikan melambat menjadi 2,5% pada 2026, sementara OECD memproyeksikan pertumbuhan Indonesia sebesar 4,7% pada 2026 dan 5,0% pada 2027. Di sisi perdagangan, BPS mencatat ekspor Indonesia Januari–April 2026 sebesar US\$92,15 miliar, impor sebesar US\$86,51 miliar, dan surplus perdagangan sebesar US\$5,64 miliar. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki daya tahan, tetapi ruang kebijakan semakin menuntut kecermatan. ([World Bank](#))

Artikel ini berargumen bahwa Indonesia tidak cukup hanya “terbuka” terhadap globalisasi. Indonesia harus menjalankan keterbukaan strategis: memilih sektor unggulan, memperkuat industri bernilai tambah, membangun SDM adaptif, mempercepat digitalisasi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjaga stabilitas makroekonomi, serta memastikan manfaat globalisasi sampai kepada UMKM, pekerja, petani, nelayan, perempuan, generasi muda, dan daerah tertinggal. Globalisasi baru menuntut bukan sekadar daya saing, tetapi juga ketahanan, inklusi, keberlanjutan, dan kedaulatan kebijakan.

Kata kunci: *globalisasi baru, Indonesia, ekonomi masa depan, ketahanan ekonomi, inklusi sosial, rantai pasok global, hilirisasi, digitalisasi, AI, transisi energi, UMKM, pembangunan inklusif.*

1. Pendahuluan

Indonesia memasuki periode sejarah ekonomi yang berbeda dari dua atau tiga dekade sebelumnya. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, globalisasi sering dipahami sebagai proses integrasi ekonomi dunia melalui perdagangan bebas, investasi asing langsung, liberalisasi pasar keuangan, alih teknologi, dan pembentukan rantai nilai global. Negara-negara

berkembang didorong untuk membuka pasar, menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan masuk ke jaringan produksi global. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan ekonomi sering diukur dari kemampuan suatu negara menjadi lokasi produksi yang efisien, stabil, dan kompetitif.

Namun kini, globalisasi tidak lagi bergerak dalam satu arah yang sederhana. Dunia sedang memasuki apa yang dapat disebut sebagai **globalisasi baru**. Globalisasi baru bukan berarti akhir dari globalisasi. Perdagangan internasional, investasi asing, migrasi tenaga kerja, arus data, dan kerja sama lintas negara tetap berlangsung. Akan tetapi, logikanya berubah. Efisiensi biaya tidak lagi menjadi satu-satunya pertimbangan. Negara dan korporasi global kini juga memperhitungkan keamanan rantai pasok, risiko geopolitik, ketahanan energi, ketergantungan teknologi, perubahan iklim, keamanan pangan, dan kedaulatan data.

Perubahan ini terlihat dalam beberapa gejala. Pertama, rantai pasok global tidak lagi semata-mata disusun berdasarkan lokasi produksi termurah, tetapi juga berdasarkan keamanan politik dan kedekatan strategis. Istilah seperti **friend-shoring**, **near-shoring**, **reshoring**, dan **de-risking** menjadi bagian dari bahasa kebijakan ekonomi global. Kedua, negara-negara besar kembali menggunakan kebijakan industri, subsidi, proteksi selektif, dan standar teknologi untuk mempertahankan posisi strategisnya. Ketiga, transisi energi membuat mineral kritis seperti nikel, kobalt, litium, tembaga, dan rare earth menjadi komoditas geopolitik. Keempat, ekonomi digital dan AI menciptakan sumber produktivitas baru, tetapi juga memperlebar kesenjangan antara negara yang memiliki infrastruktur digital dan talenta teknologi dengan negara yang tertinggal.

World Bank memperingatkan bahwa pertumbuhan global 2026 diproyeksikan melambat menjadi 2,5%, dengan risiko utama berupa konflik geopolitik, gangguan pasar komoditas, ketidakpastian kebijakan, tekanan energi dan pangan, serta tantangan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang. World Bank juga menekankan pentingnya investasi dalam

modal fisik, manusia, digital, iklim usaha, serta mobilisasi investasi swasta.
([World Bank](#))

Bagi Indonesia, situasi ini menghadirkan dilema sekaligus kesempatan. Di satu sisi, perlambatan global dapat menekan ekspor, investasi, nilai tukar, daya beli, dan penerimaan negara. OECD memproyeksikan pertumbuhan Indonesia sebesar 4,7% pada 2026 dan 5,0% pada 2027, dengan risiko dari biaya energi, ketidakpastian kebijakan, konsumsi dan investasi yang melemah, serta pasar tenaga kerja yang melunak. ([OECD](#)) Di sisi lain, Indonesia memiliki aset besar: pasar domestik yang luas, demografi besar, posisi strategis di ASEAN dan Indo-Pasifik, sumber daya mineral untuk transisi energi, kekayaan hayati, potensi ekonomi digital, serta pengalaman dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan masuk ke globalisasi. Indonesia sudah berada di dalamnya. Pertanyaan yang lebih penting adalah: **bagaimana Indonesia menata posisinya agar globalisasi baru tidak hanya menguntungkan elite, korporasi besar, dan sektor tertentu, tetapi juga memperkuat ekonomi rakyat, memperluas kelas menengah, meningkatkan produktivitas nasional, menjaga lingkungan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi?**

2. Dari Globalisasi Lama ke Globalisasi Baru

Globalisasi lama dapat digambarkan sebagai globalisasi efisiensi. Dalam paradigma ini, produksi dipindahkan ke lokasi yang paling murah, pasokan bahan baku dicari dari negara yang paling kompetitif, dan pasar dibuka agar barang, jasa, modal, serta teknologi mengalir lebih bebas. Rantai nilai global berkembang pesat karena perusahaan multinasional memecah proses produksi ke banyak negara. Satu produk dapat dirancang di Amerika Serikat, komponennya dibuat di Asia Timur, dirakit di Asia Tenggara, dan dijual ke seluruh dunia.

Model ini menciptakan pertumbuhan besar bagi banyak negara, termasuk negara-negara Asia Timur dan Tenggara. Namun model ini juga memiliki kelemahan. Ia sering membuat negara berkembang terjebak dalam posisi nilai tambah rendah: menyediakan tenaga kerja murah, bahan mentah, atau perakitan sederhana. Selain itu, globalisasi efisiensi menghasilkan ketergantungan berlebihan pada rantai pasok panjang. Pandemi COVID-19, perang dagang, konflik geopolitik, dan gangguan logistik menunjukkan bahwa sistem yang sangat efisien dapat menjadi rapuh ketika menghadapi krisis.

Globalisasi baru muncul sebagai respons terhadap kerentanan tersebut. Dalam globalisasi baru, negara dan perusahaan tidak hanya bertanya "di mana biaya paling rendah?", tetapi juga "di mana pasokan paling aman?", "siapa mitra yang dapat dipercaya?", "bagaimana mengurangi risiko geopolitik?", "apakah produksi memenuhi standar lingkungan?", dan "apakah teknologi yang digunakan aman bagi data dan kedaulatan nasional?"

WTO mencatat bahwa perdagangan dunia menunjukkan tanda perlambatan pada 2026, dengan pertumbuhan perdagangan barang yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik, harga energi, jaringan transportasi, dan dinamika produk terkait AI. ([World Trade Organization](#)) Ini menegaskan bahwa perdagangan global tetap berjalan, tetapi lebih tidak stabil dan lebih politis dibanding masa sebelumnya.

Globalisasi baru juga ditandai oleh pergeseran dari **just-in-time** menuju **just-in-case**. Pada masa globalisasi lama, perusahaan berusaha menekan stok serendah mungkin agar efisien. Kini, banyak perusahaan dan negara memilih memiliki cadangan strategis, pemasok alternatif, dan rantai pasok yang lebih pendek atau lebih aman. Dalam sektor pangan, energi, obat-obatan, semikonduktor, mineral kritis, dan teknologi digital, prinsip ketahanan menjadi semakin penting.

Bagi Indonesia, perubahan ini membawa pelajaran besar: negara tidak boleh hanya menjadi pemasok murah atau pasar konsumsi. Indonesia

harus meningkatkan posisi dalam rantai nilai global. Negara harus mampu mengubah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah, mengubah pasar domestik menjadi basis industri, mengubah demografi menjadi tenaga kerja produktif, dan mengubah digitalisasi menjadi peningkatan efisiensi nasional.

3. Posisi Indonesia dalam Peta Globalisasi Baru

Indonesia memiliki posisi yang unik. Secara geografis, Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta di antara Asia Timur, Asia Selatan, dan Australia. Secara ekonomi, Indonesia merupakan pasar besar dengan kelas menengah yang terus berkembang, meskipun mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Secara politik, Indonesia menjadi negara demokrasi besar di dunia Muslim dan aktor utama ASEAN. Secara sumber daya, Indonesia memiliki nikel, batu bara, sawit, gas, panas bumi, perikanan, hutan tropis, dan keanekaragaman hayati.

Posisi ini memberi Indonesia potensi sebagai **poros ekonomi Indo-Pasifik**. Namun potensi saja tidak cukup. Banyak negara memiliki sumber daya alam, tetapi tetap tertinggal karena gagal membangun institusi, industri, pendidikan, teknologi, dan tata kelola. Sejarah pembangunan menunjukkan bahwa negara yang berhasil bukan hanya negara yang kaya sumber daya, melainkan negara yang mampu mengubah sumber daya menjadi kapabilitas produktif.

Data perdagangan terbaru menunjukkan daya tahan Indonesia. BPS mencatat bahwa ekspor Indonesia Januari–April 2026 mencapai US\$92,15 miliar, naik 5,48% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Impor Januari–April 2026 mencapai US\$86,51 miliar, naik 13,40%. Neraca perdagangan Januari–April 2026 tetap surplus US\$5,64 miliar, dengan surplus nonmigas US\$14,16 miliar dan defisit migas US\$8,52 miliar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Angka ini menunjukkan dua hal. Pertama, sektor

nonmigas masih menjadi penopang penting perdagangan Indonesia. Kedua, ketergantungan energi impor tetap menjadi sumber tekanan struktural.

Di tingkat kawasan, ASEAN menjadi salah satu pusat investasi global. ASEAN Investment Report 2025 mencatat bahwa FDI ke ASEAN naik 8% menjadi US\$226 miliar, sementara FDI global justru menurun 11%. Laporan tersebut juga mencatat bahwa FDI manufaktur ASEAN tumbuh hampir 150% menjadi US\$44 miliar, dengan industri intensif rantai pasok dan ekonomi digital sebagai pendorong penting. ([UNCTAD Investment Policy Hub](#)) Ini merupakan peluang besar bagi Indonesia. Jika Indonesia mampu memperbaiki iklim investasi, infrastruktur, kualitas SDM, kepastian hukum, dan integrasi industri, maka Indonesia dapat menangkap sebagian besar relokasi investasi global ke ASEAN.

Namun, Indonesia tidak sendirian. Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India juga bersaing menarik investasi. Persaingan ini tidak hanya ditentukan oleh upah murah, tetapi oleh kualitas logistik, stabilitas regulasi, kemudahan usaha, kualitas tenaga kerja, ekosistem pemasok, akses energi bersih, dan kepastian hukum. Karena itu, Indonesia harus menghindari mentalitas “pasar besar pasti menarik investor”. Pasar besar penting, tetapi investor jangka panjang membutuhkan tata kelola yang dapat dipercaya.

4. Fragmentasi Geopolitik dan Tantangan Kedaulatan Ekonomi

Globalisasi baru berkembang di tengah fragmentasi geopolitik. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, perang teknologi, konflik di Timur Tengah, ketegangan Laut Cina Selatan, perang Rusia-Ukraina, serta proteksionisme industri di berbagai negara telah mengubah arsitektur ekonomi dunia. Perdagangan dan investasi tidak lagi netral secara politik. Teknologi, energi, pangan, dan mineral menjadi bagian dari strategi keamanan nasional.

Bagi Indonesia, fragmentasi geopolitik menghadirkan dua konsekuensi. Pertama, Indonesia harus menjaga kebijakan luar negeri ekonomi yang bebas aktif, tidak terjebak dalam blok tertentu, tetapi tetap realistis terhadap kepentingan nasional. Kedua, Indonesia harus membangun kapasitas domestik agar tidak terlalu bergantung pada satu negara, satu pasar, satu teknologi, atau satu sumber pembiayaan.

Dalam hal mineral kritis, misalnya, Indonesia memiliki posisi kuat karena nikel menjadi bahan penting bagi baterai dan kendaraan listrik. IEA menempatkan nikel sebagai salah satu mineral transisi energi utama dan menekankan bahwa konsentrasi geografis rantai pasok mineral menciptakan risiko bagi keamanan energi dan ekonomi. ([IEA](#)) Posisi Indonesia sebagai produsen nikel besar dapat menjadi sumber kekuatan. Namun bila pengolahan, teknologi, pembiayaan, dan pasar akhir dikuasai pihak luar, maka kekuatan tersebut dapat menjadi ketergantungan baru.

Kedaulatan ekonomi dalam globalisasi baru bukan berarti menutup diri. Kedaulatan ekonomi berarti kemampuan negara memilih arah pembangunan, menjaga kepentingan publik, mengelola risiko global, dan bernegosiasi secara bermartabat dengan aktor internasional. Negara yang sepenuhnya tertutup akan tertinggal. Tetapi negara yang sepenuhnya menyerahkan nasibnya kepada pasar global juga rentan. Jalan tengahnya adalah **keterbukaan strategis**.

Keterbukaan strategis berarti Indonesia tetap terbuka terhadap perdagangan, investasi, teknologi, dan kerja sama internasional, tetapi dengan arah kebijakan yang jelas. Investasi asing diterima bukan hanya karena membawa modal, tetapi karena membawa teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, memperkuat pemasok lokal, meningkatkan ekspor, dan mematuhi standar lingkungan. Perdagangan bebas didukung bukan sekadar untuk impor murah, tetapi untuk memperluas daya saing nasional. Kerja sama internasional dijalankan bukan untuk ketergantungan, tetapi untuk peningkatan kapabilitas domestik.

5. Hilirisasi: Peluang dan Batas

Hilirisasi adalah salah satu strategi utama Indonesia dalam globalisasi baru. Intinya sederhana: Indonesia tidak ingin terus mengekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Indonesia ingin mengolah sumber daya alam di dalam negeri, menciptakan industri turunan, meningkatkan ekspor manufaktur, membuka lapangan kerja, dan memperkuat basis teknologi.

Dalam konteks nikel, hilirisasi telah mengubah struktur investasi dan ekspor Indonesia. Pembangunan smelter, kawasan industri, dan industri baterai menjadi simbol perubahan dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi pengolahan. Namun hilirisasi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai pembangunan pabrik pengolahan. Hilirisasi sejati berarti peningkatan **kapabilitas nasional**. Ia harus mencakup riset material, pendidikan teknik, pengembangan pemasok lokal, penguasaan teknologi, peningkatan standar lingkungan, serta perluasan industri lanjutan.

Ada beberapa risiko hilirisasi yang perlu diwaspadai. Pertama, risiko nilai tambah dangkal. Jika Indonesia hanya menyediakan lahan, energi murah, bahan baku, dan tenaga kerja, sementara teknologi, mesin, manajemen, dan pasar dikuasai investor luar, maka nilai tambah domestik tetap terbatas. Kedua, risiko lingkungan. Smelter dan industri mineral dapat meningkatkan emisi, konsumsi energi, limbah, serta tekanan terhadap masyarakat lokal. Ketiga, risiko ketimpangan wilayah. Kawasan industri dapat tumbuh pesat, tetapi masyarakat sekitar belum tentu menikmati manfaat yang adil. Keempat, risiko ketergantungan komoditas baru. Indonesia dapat berpindah dari ketergantungan ekspor bahan mentah ke ketergantungan ekspor produk antara yang masih rentan terhadap siklus harga global.

Karena itu, hilirisasi harus ditempatkan dalam strategi industrialisasi nasional yang lebih luas. Industri nikel harus dihubungkan dengan kendaraan listrik, energi terbarukan, riset baterai, daur ulang mineral, dan

pengembangan manufaktur lokal. Hilirisasi sawit harus dikaitkan dengan oleokimia, bioenergi, pangan, kosmetik, farmasi, dan standar keberlanjutan. Hilirisasi perikanan harus dikaitkan dengan cold chain, industri makanan, bioteknologi laut, dan ekspor bernilai tinggi. Hilirisasi pertanian harus dikaitkan dengan agroindustri, logistik, digital farming, dan pemberdayaan petani.

Dengan kata lain, hilirisasi harus naik kelas dari kebijakan komoditas menjadi kebijakan pembelajaran nasional.

6. Standar Lingkungan Global dan Tantangan Produk Indonesia

Globalisasi baru bukan hanya soal tarif dan harga. Standar lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi semakin penting. Produk ekspor harus memenuhi tuntutan traceability, bebas deforestasi, emisi rendah, hak pekerja, dan kepatuhan sosial. Ini tampak jelas dalam kebijakan Uni Eropa tentang deforestasi. EUDR mengharuskan produk yang ditempatkan, dijual, atau diekspor dari pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi, mencakup komoditas seperti sapi, kakao, kopi, sawit, karet, kedelai, kayu, dan produk turunannya. Penerapan untuk operator besar dan menengah dijadwalkan mulai 30 Desember 2026, sementara operator mikro dan kecil pada 30 Juni 2027. ([Green Forum](#))

Bagi Indonesia, standar seperti ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia dapat menjadi hambatan non-tarif yang membebani eksportir, khususnya petani kecil dan UMKM yang belum memiliki dokumen lahan, sistem pelacakan digital, sertifikasi, dan akses pembiayaan. Di sisi lain, standar ini dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola komoditas, meningkatkan reputasi produk Indonesia, dan membuka akses pasar premium.

Kesalahan yang harus dihindari adalah memandang standar lingkungan semata-mata sebagai ancaman eksternal. Memang benar bahwa standar global sering tidak netral; ia dapat mencerminkan kepentingan negara maju dan menciptakan beban bagi negara berkembang. Namun tren keberlanjutan tidak akan hilang. Konsumen, investor, bank, asuransi, dan regulator global semakin menuntut bukti bahwa produk tidak merusak lingkungan dan tidak melanggar hak sosial.

Karena itu, Indonesia perlu menempuh strategi ganda. Pertama, diplomasi ekonomi harus memperjuangkan keadilan standar internasional agar tidak mendiskriminasi petani kecil dan negara berkembang. Kedua, di dalam negeri Indonesia harus mempercepat sistem traceability nasional, sertifikasi yang kredibel, legalitas lahan, digitalisasi rantai pasok, perlindungan hutan, dan pendampingan petani. Dengan cara ini, standar global tidak hanya menjadi beban, tetapi menjadi pemicu modernisasi tata kelola komoditas.

7. Digitalisasi dan AI sebagai Mesin Produktivitas Baru

Dalam globalisasi lama, keunggulan kompetitif banyak ditentukan oleh upah murah, bahan baku, dan lokasi produksi. Dalam globalisasi baru, keunggulan kompetitif semakin ditentukan oleh data, algoritma, konektivitas, talenta digital, keamanan siber, dan kemampuan mengadopsi AI. Negara yang mampu menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas akan memperoleh lompatan besar. Negara yang hanya menjadi konsumen platform asing akan tertinggal.

Digitalisasi Indonesia telah berkembang pesat dalam e-commerce, pembayaran digital, transportasi daring, layanan keuangan, pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik. Namun masalah mendasar masih besar: kesenjangan akses internet antarwilayah, kualitas jaringan, literasi digital, keamanan data, kualitas talenta, dan rendahnya adopsi teknologi oleh UMKM serta sektor tradisional.

AI memberi peluang untuk meningkatkan produktivitas dalam banyak sektor. Di pertanian, AI dapat membantu prediksi cuaca, deteksi hama, rekomendasi pupuk, dan manajemen irigasi. Di kesehatan, AI dapat membantu skrining penyakit, manajemen rekam medis, dan alokasi layanan. Di pendidikan, AI dapat mendukung pembelajaran adaptif. Di logistik, AI dapat mengoptimalkan rute dan stok. Di pemerintahan, AI dapat mempercepat layanan publik dan mendeteksi penyimpangan.

Namun AI juga membawa risiko. Otomasi dapat menggantikan pekerjaan rutin. Data pribadi dapat disalahgunakan. Bias algoritma dapat memperkuat ketidakadilan. Platform besar dapat memonopoli pasar. Negara yang tidak memiliki kapasitas regulasi dapat kehilangan kontrol atas data dan infrastruktur digitalnya.

Karena itu, strategi AI Indonesia harus bersifat human-centered. Teknologi harus diarahkan untuk memperkuat manusia, bukan menggantikannya secara tidak adil. Pendidikan dan pelatihan ulang menjadi sangat penting. Pekerja harus disiapkan untuk beralih dari pekerjaan rutin menuju pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, analisis, empati, koordinasi, dan pemecahan masalah. UMKM harus diberi akses terhadap alat digital sederhana, bukan hanya perusahaan besar yang menikmati manfaat AI.

Digitalisasi yang inklusif memerlukan tiga fondasi: infrastruktur, kompetensi, dan tata kelola. Infrastruktur berarti jaringan, cloud, perangkat, dan pusat data. Kompetensi berarti literasi digital, vokasi teknologi, universitas, riset, dan pembelajaran sepanjang hayat. Tata kelola berarti perlindungan data, etika AI, keamanan siber, persaingan sehat, dan akuntabilitas algoritmik.

8. Ketahanan Pangan dan Energi

Globalisasi baru menunjukkan bahwa pangan dan energi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada pasar global. Gangguan perang, cuaca ekstrem, konflik logistik, fluktuasi harga minyak, dan perubahan kebijakan ekspor negara lain dapat langsung memengaruhi harga domestik.

Indonesia sebagai negara besar harus membangun ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi stabilitas sosial.

Ketahanan pangan bukan berarti semua bahan pangan harus diproduksi sendiri tanpa impor. Ketahanan pangan berarti masyarakat memiliki akses yang stabil, terjangkau, bergizi, dan berkelanjutan terhadap pangan. Dalam beberapa komoditas, impor masih diperlukan. Namun ketergantungan impor yang terlalu besar pada komoditas strategis menciptakan kerentanan. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat produksi domestik, diversifikasi pangan lokal, infrastruktur irigasi, cadangan pangan, teknologi pertanian, logistik dingin, dan kelembagaan petani.

Ketahanan energi juga penting. OECD mencatat bahwa kenaikan biaya energi dan kebijakan subsidi memengaruhi proyeksi ekonomi Indonesia, serta merekomendasikan percepatan energi terbarukan untuk memperkuat keamanan energi. ([OECD](#)) Indonesia memiliki potensi panas bumi, surya, hidro, biomassa, angin, dan energi laut. Namun transisi energi memerlukan investasi besar, reformasi regulasi, jaringan transmisi, penyimpanan energi, dan kepastian harga.

Ketahanan pangan dan energi harus dikaitkan dengan inklusi. Petani, nelayan, dan masyarakat desa tidak boleh hanya menjadi objek program. Mereka harus menjadi pelaku utama transformasi. Digitalisasi pertanian, koperasi modern, pembiayaan mikro-produktif, akses pasar, penyuluhan berbasis data, dan regenerasi petani muda perlu menjadi agenda nasional.

9. Stabilitas Makroekonomi sebagai Prasyarat Transformasi

Globalisasi baru penuh ketidakpastian. Dalam situasi seperti ini, stabilitas makroekonomi menjadi modal penting. Nilai tukar yang terlalu bergejolak, inflasi tinggi, defisit fiskal tak terkendali, dan kenaikan utang dapat mengurangi ruang pembangunan. Indonesia selama ini relatif mampu menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi tekanan ke depan tidak ringan.

IMF memproyeksikan pertumbuhan riil Indonesia 5,0% dan inflasi 3,0% pada 2026. ([IMF](#)) Proyeksi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam jalur pertumbuhan moderat. Namun pertumbuhan 5% belum tentu cukup untuk menciptakan lompatan struktural, terutama jika produktivitas rendah, pekerjaan informal besar, dan ketimpangan wilayah bertahan.

Stabilitas fiskal menjadi sangat penting karena pemerintah menghadapi banyak kebutuhan: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, subsidi energi, transisi energi, digitalisasi, pertahanan, dan pembangunan daerah. OECD menekankan bahwa efisiensi belanja publik dapat ditingkatkan melalui subsidi energi yang lebih tepat sasaran kepada rumah tangga rentan. ([OECD](#)) Prinsip ini penting karena anggaran negara harus diarahkan pada belanja yang produktif dan adil.

Kebijakan fiskal masa depan harus menjawab dua pertanyaan: apakah belanja meningkatkan produktivitas jangka panjang? dan apakah belanja memperluas keadilan sosial? Belanja yang hanya bersifat konsumtif, politis, atau tidak tepat sasaran akan mempersempit ruang fiskal. Sebaliknya, belanja untuk pendidikan, kesehatan, riset, infrastruktur dasar, sanitasi, digitalisasi, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran dapat memperkuat pertumbuhan inklusif.

Stabilitas makro juga membutuhkan koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, industri, perdagangan, dan sosial. Pertumbuhan tinggi tidak dapat dicapai hanya dengan mendorong investasi, jika inflasi tidak terkendali, rupiah melemah tajam, atau daya beli masyarakat turun. Sebaliknya, stabilitas yang terlalu konservatif tanpa transformasi produktif

juga dapat membuat ekonomi stagnan. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan transformasi.

10. Pembangunan Inklusif: Dari Pertumbuhan ke Kapabilitas

Globalisasi sering menghasilkan pemenang dan pecundang. Pemenangnya biasanya adalah kelompok yang memiliki pendidikan, modal, koneksi, teknologi, dan akses pasar. Pecundangnya adalah pekerja berupah rendah, petani kecil, nelayan, UMKM informal, daerah terpencil, dan kelompok yang tidak mampu mengikuti perubahan teknologi. Karena itu, globalisasi baru harus dijawab dengan agenda inklusi.

Inklusi bukan sekadar bantuan sosial. Bantuan sosial penting untuk melindungi kelompok rentan, tetapi inklusi ekonomi lebih luas daripada itu. Inklusi berarti setiap warga memiliki kesempatan meningkatkan kapabilitasnya: pendidikan berkualitas, kesehatan, keterampilan, akses pembiayaan, akses pasar, identitas hukum, perlindungan sosial, konektivitas, dan lingkungan yang aman.

Dalam konteks Indonesia, inklusi memiliki beberapa dimensi. Pertama, inklusi wilayah. Pembangunan tidak boleh terkonsentrasi di Jawa dan kota besar. Indonesia timur, wilayah kepulauan, desa, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal harus terhubung dengan infrastruktur fisik dan digital. Kedua, inklusi usaha. UMKM harus naik kelas melalui pembiayaan, pelatihan, teknologi, sertifikasi, desain produk, dan akses rantai pasok. Ketiga, inklusi tenaga kerja. Pekerja informal harus memperoleh perlindungan sosial, pelatihan ulang, dan peluang kerja produktif. Keempat, inklusi gender dan generasi muda. Perempuan dan anak muda harus memiliki akses terhadap pendidikan, teknologi, modal, dan kepemimpinan ekonomi.

Pertumbuhan inklusif memerlukan desain kebijakan yang sadar distribusi. Jika hilirisasi hanya memperkaya korporasi besar, maka ia tidak inklusif. Jika digitalisasi hanya menguntungkan platform besar, maka ia tidak inklusif. Jika investasi asing masuk tetapi tidak membangun pemasok lokal, maka manfaatnya terbatas. Jika pembangunan infrastruktur tidak menghubungkan produsen kecil ke pasar, maka dampaknya tidak optimal.

Kebijakan inklusif harus menghubungkan ekonomi besar dan ekonomi rakyat. BUMN dan korporasi besar dapat menjadi pembeli utama produk UMKM. Kawasan industri dapat diwajibkan mengembangkan pemasok lokal. Program digitalisasi dapat menyediakan alat manajemen sederhana bagi usaha kecil. Pendidikan vokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri daerah. Dengan demikian, globalisasi tidak hanya menjadi cerita ekspor, investasi, dan PDB, tetapi juga cerita peningkatan martabat manusia.

11. Pendidikan, SDM, dan Produktivitas Nasional

Kunci utama ekonomi masa depan adalah produktivitas. Indonesia tidak bisa selamanya bersaing dengan upah murah atau sumber daya alam. Negara berpendapatan tinggi adalah negara yang mampu meningkatkan produktivitas melalui pendidikan, teknologi, organisasi, inovasi, dan institusi.

Masalah produktivitas Indonesia terkait erat dengan kualitas pendidikan dan pelatihan. Banyak lulusan belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pendidikan vokasi sering belum terhubung dengan dunia kerja. Perguruan tinggi masih perlu memperkuat riset terapan, kolaborasi industri, dan kewirausahaan teknologi. Pelatihan kerja perlu lebih adaptif terhadap perubahan AI, otomasi, energi hijau, dan ekonomi digital.

Dalam globalisasi baru, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan formal. Pendidikan harus membentuk kemampuan berpikir kritis, analitis, konseptual, sistemik, kreatif, etis, dan kolaboratif. Dunia kerja masa depan membutuhkan manusia yang mampu belajar ulang, bekerja lintas disiplin, memahami data, menggunakan AI, dan mengambil keputusan dalam ketidakpastian.

Pembangunan SDM juga harus memperhatikan pendidikan dasar. Kemampuan literasi, numerasi, sains, dan karakter kerja dibentuk sejak dini. Jika pendidikan dasar lemah, maka pelatihan teknologi tinggi sulit berhasil. Karena itu, agenda globalisasi baru harus menghubungkan pendidikan dasar, vokasi, perguruan tinggi, riset, dan industri dalam satu ekosistem pembelajaran nasional.

12. UMKM dalam Rantai Nilai Global

UMKM sering disebut tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun dalam praktiknya, banyak UMKM masih berada dalam produktivitas rendah, pasar lokal terbatas, pembukuan sederhana, akses modal sulit, teknologi rendah, dan minim sertifikasi. Globalisasi baru dapat memperlebar kesenjangan jika UMKM tidak dipersiapkan.

Agar UMKM masuk ke rantai nilai global, diperlukan strategi bertahap. Pertama, formalisasi usaha harus dipermudah tanpa membebani. Legalitas usaha, izin, pajak sederhana, dan akses identitas bisnis harus menjadi pintu masuk ke pembiayaan dan pasar. Kedua, digitalisasi UMKM harus melampaui promosi online. UMKM perlu dibantu dalam manajemen stok, pencatatan keuangan, pembayaran digital, desain produk, kemasan, logistik, dan analisis pelanggan. Ketiga, sertifikasi produk harus diperluas: halal, SNI, organik, traceability, keamanan pangan, dan standar ekspor. Keempat, kemitraan dengan perusahaan besar perlu dibuat lebih adil.

UMKM juga dapat menjadi bagian dari ekonomi hijau. Produk lokal berbasis bahan alami, pangan sehat, kerajinan berkelanjutan, pariwisata

berbasis komunitas, dan circular economy dapat memiliki nilai tambah tinggi bila dikelola dengan kualitas dan branding yang baik.

Namun UMKM tidak boleh romantisasi. Tidak semua UMKM harus bertahan dalam bentuk mikro. Sebagian harus naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah yang produktif. Sebagian harus bergabung dalam koperasi modern atau klaster produksi. Sebagian harus menjadi pemasok industri. Kebijakan UMKM harus mendorong produktivitas, bukan hanya mempertahankan informalitas.

13. ASEAN sebagai Rumah Strategis Indonesia

Dalam globalisasi baru, kawasan menjadi semakin penting. Ketika globalisasi terlalu luas menjadi tidak pasti, regionalisasi memberi ruang stabilitas. ASEAN adalah rumah strategis Indonesia. Sebagai ekonomi terbesar ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab dan peluang untuk menjadikan ASEAN sebagai basis produksi, pasar, dan diplomasi ekonomi.

ASEAN menarik karena berada di antara kekuatan besar tanpa sepenuhnya menjadi bagian dari satu blok. Kawasan ini memiliki populasi besar, pertumbuhan relatif tinggi, urbanisasi, digitalisasi cepat, dan posisi strategis dalam rantai pasok global. Data ASEAN Investment Report menunjukkan bahwa ASEAN tetap menjadi penerima FDI utama di antara wilayah berkembang dan berkembang sebagai hub rantai pasok global.

[\(UNCTAD Investment Policy Hub\)](#)

Indonesia perlu memperkuat integrasi ekonomi ASEAN dalam beberapa bidang. Pertama, perdagangan intra-ASEAN harus ditingkatkan melalui pengurangan hambatan non-tarif dan harmonisasi standar. Kedua, rantai pasok regional harus diperkuat, misalnya dalam otomotif, elektronik, pangan, energi, dan kesehatan. Ketiga, ekonomi digital ASEAN perlu dihubungkan melalui interoperabilitas pembayaran, perlindungan data, dan

keamanan siber. Keempat, kerja sama pendidikan dan mobilitas talenta perlu diperluas. Kelima, ASEAN harus menjadi platform diplomasi menghadapi standar global, perubahan iklim, dan fragmentasi geopolitik.

Bagi Indonesia, ASEAN bukan alternatif terhadap globalisasi, melainkan fondasi untuk masuk ke globalisasi secara lebih kuat. Indonesia akan lebih berdaya bila menjadi pemimpin kawasan yang stabil, inklusif, dan inovatif.

14. Tata Kelola: Kunci Pembeda antara Peluang dan Krisis

Globalisasi baru memberi peluang kepada Indonesia, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh tata kelola. Negara dengan tata kelola baik dapat mengubah investasi menjadi produktivitas, sumber daya menjadi nilai tambah, teknologi menjadi inovasi, dan pertumbuhan menjadi kesejahteraan. Negara dengan tata kelola lemah dapat mengalami korupsi, rente, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan.

Tata kelola ekonomi masa depan mencakup beberapa prinsip. Pertama, kepastian hukum. Investor, UMKM, petani, pekerja, dan masyarakat membutuhkan aturan yang jelas dan konsisten. Kedua, transparansi. Proyek strategis, insentif fiskal, penugasan BUMN, dan investasi publik harus dapat diawasi. Ketiga, akuntabilitas. Setiap kebijakan harus memiliki indikator hasil dan mekanisme evaluasi. Keempat, partisipasi publik. Masyarakat terdampak harus dilibatkan, terutama dalam proyek lahan, tambang, kawasan industri, dan lingkungan. Kelima, integritas. Korupsi dan konflik kepentingan harus ditekan secara sistemik.

Tata kelola juga berarti kemampuan koordinasi. Banyak masalah ekonomi Indonesia bukan karena tidak ada kebijakan, tetapi karena kebijakan terfragmentasi. Kementerian, pemerintah daerah, BUMN, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan sektor swasta sering berjalan sendiri-sendiri. Globalisasi baru menuntut orkestrasi nasional. Kebijakan industri

harus terhubung dengan pendidikan, energi, perdagangan, investasi, riset, lingkungan, dan pembangunan daerah.

15. Strategi Besar: Menata Ekonomi Masa Depan yang Tangguh dan Inklusif

Indonesia memerlukan strategi besar yang dapat disebut **ketahanan inklusif berbasis produktivitas**. Strategi ini memiliki enam pilar.

Pilar pertama adalah **keterbukaan strategis**. Indonesia tetap membuka diri terhadap investasi dan perdagangan, tetapi dengan prioritas nasional yang jelas: teknologi, nilai tambah, lapangan kerja berkualitas, pemasok lokal, ekspor, dan keberlanjutan.

Pilar kedua adalah **industrialisasi bernilai tambah**. Hilirisasi harus diperluas dari mineral ke pangan, sawit, perikanan, kehutanan berkelanjutan, kesehatan, digital, dan energi hijau. Industrialisasi harus berbasis pembelajaran teknologi, bukan sekadar eksploitasi sumber daya.

Pilar ketiga adalah **SDM adaptif**. Pendidikan, vokasi, perguruan tinggi, riset, dan pelatihan ulang harus disiapkan untuk AI, otomasi, ekonomi hijau, dan perubahan pekerjaan.

Pilar keempat adalah **digitalisasi inklusif**. Infrastruktur digital harus menjangkau wilayah tertinggal. AI harus digunakan untuk produktivitas publik dan UMKM, bukan hanya untuk korporasi besar.

Pilar kelima adalah **ketahanan pangan, energi, dan iklim**. Indonesia harus memperkuat produksi pangan, energi terbarukan, cadangan strategis, dan adaptasi perubahan iklim.

Pilar keenam adalah **tata kelola demokratis**. Negara harus kuat, tetapi tidak boleh tertutup. Pasar harus dinamis, tetapi tidak boleh liar.

Masyarakat harus dilibatkan, bukan hanya menjadi penonton pembangunan.

16. Penutup

Indonesia berada di tengah globalisasi baru yang lebih kompleks, lebih politis, lebih digital, lebih hijau, dan lebih tidak pasti. Globalisasi baru tidak dapat dihadapi dengan nostalgia terhadap proteksionisme lama, tetapi juga tidak dapat dijawab dengan liberalisasi naif. Indonesia membutuhkan jalan tengah yang cerdas: terbuka tetapi selektif, kompetitif tetapi inklusif, industrial tetapi berkelanjutan, digital tetapi manusiawi, dan kuat secara negara tetapi akuntabel secara demokratis.

Masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya PDB, tetapi oleh kualitas transformasi. Apakah Indonesia mampu keluar dari ketergantungan komoditas? Apakah hilirisasi menghasilkan pembelajaran teknologi? Apakah digitalisasi memperkuat UMKM dan layanan publik? Apakah investasi asing membangun kapabilitas lokal? Apakah transisi energi menciptakan pekerjaan baru? Apakah pertumbuhan ekonomi mengurangi ketimpangan? Apakah anak muda Indonesia siap memasuki ekonomi AI dan ekonomi hijau?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah Indonesia hanya menjadi pasar besar dalam globalisasi baru, atau menjadi kekuatan ekonomi masa depan yang tangguh dan inklusif. Indonesia memiliki modal besar. Tetapi modal besar harus diubah menjadi kapasitas besar. Kapasitas besar harus diarahkan oleh tata kelola besar. Dan tata kelola besar harus berakar pada tujuan moral pembangunan: kesejahteraan, keadilan, martabat manusia, dan keberlanjutan generasi mendatang.

Glossarium

AI / Kecerdasan Buatan: Teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, prediksi, pengambilan keputusan, dan pemrosesan bahasa.

ASEAN: Association of Southeast Asian Nations, organisasi regional Asia Tenggara yang menjadi basis penting kerja sama ekonomi dan geopolitik Indonesia.

Circular economy: Model ekonomi yang menekan limbah melalui penggunaan ulang, daur ulang, perbaikan, dan desain produk berkelanjutan.

De-risking: Strategi mengurangi risiko ketergantungan ekonomi terhadap negara, pemasok, teknologi, atau pasar tertentu tanpa sepenuhnya memutus hubungan.

Digitalisasi inklusif: Transformasi digital yang memberi manfaat luas kepada masyarakat, termasuk UMKM, daerah tertinggal, pekerja informal, dan kelompok rentan.

EUDR: European Union Deforestation Regulation, regulasi Uni Eropa yang mensyaratkan produk tertentu bebas deforestasi untuk masuk pasar Uni Eropa.

FDI: Foreign Direct Investment atau investasi asing langsung, yaitu investasi jangka panjang oleh investor asing dalam aset produktif suatu negara.

Friend-shoring: Pemindahan rantai pasok ke negara-negara yang dianggap sebagai mitra politik atau strategis yang lebih dapat dipercaya.

Globalisasi baru: Fase globalisasi yang ditandai oleh fragmentasi geopolitik, keamanan rantai pasok, digitalisasi, AI, standar lingkungan, transisi energi, dan kebijakan industri baru.

Green economy: Ekonomi yang mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi risiko lingkungan, emisi karbon, dan kerusakan ekosistem.

Hilirisasi: Proses meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan domestik sebelum dijual ke pasar lokal atau global.

Inklusi ekonomi: Kondisi ketika seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi.

Ketahanan ekonomi: Kemampuan ekonomi bertahan, beradaptasi, dan pulih dari guncangan eksternal maupun internal.

Near-shoring: Pemindahan produksi atau rantai pasok ke negara yang secara geografis lebih dekat dengan pasar utama.

Produktivitas: Kemampuan menghasilkan output lebih besar atau lebih bernilai dengan input yang sama atau lebih efisien.

Rantai nilai global: Jaringan produksi lintas negara yang membagi proses desain, produksi, distribusi, dan pemasaran ke berbagai lokasi.

Reshoring: Pemindahan kembali kegiatan produksi dari luar negeri ke negara asal perusahaan.

Sovereign capability: Kemampuan negara membangun kapasitas strategis dalam teknologi, industri, pangan, energi, data, dan kebijakan.

Traceability: Kemampuan melacak asal-usul produk, bahan baku, proses produksi, dan pergerakannya dalam rantai pasok.

Transisi energi: Peralihan dari energi fosil menuju energi rendah karbon dan terbarukan.

UMKM: Usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi basis penting ekonomi rakyat.

Daftar Pustaka

(APA 7; DOI dicantumkan bila tersedia)

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3–30. doi:10.1257/jep.33.2.3

ASEAN Secretariat & UNCTAD. (2025). *ASEAN investment report 2025: Investment and supply chain development in ASEAN*. DOI tidak tersedia.

Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30. doi:10.1257/jep.29.3.3

Badan Pusat Statistik. (2026). *Exports and imports of Indonesia in April 2026 reached USD25.30 billion and USD25.21 billion, respectively*. DOI tidak tersedia.

Baldwin, R. (2016). *The great convergence: Information technology and the new globalization*. Harvard University Press. DOI tidak tersedia.

European Commission. (2026). *Implementing the EU deforestation regulation*. DOI tidak tersedia.

Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104. doi:10.1080/09692290500049805

Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. *Journal of Economic Growth*, 12, 1–25. doi:10.1007/s10887-006-9009-4

Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10570–10575. doi:10.1073/pnas.0900943106

International Energy Agency. (2025). *Global critical minerals outlook 2025*. DOI tidak tersedia.

International Energy Agency. (2026). *Critical mineral traceability for energy and economic security*. DOI tidak tersedia.

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia and the IMF: Country data*. DOI tidak tersedia.

OECD. (2026). *Indonesia: OECD economic outlook, volume 2026 issue 1*. DOI tidak tersedia.

Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton. DOI tidak tersedia.

Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21, 1–33. doi:10.1007/s10887-015-9122-3

Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton. DOI tidak tersedia.

UNCTAD. (2026). *Global investment trends monitor: Global FDI up 14% in 2025—Growth limited to developed economies*. DOI tidak tersedia.

World Bank. (2026). *Global economic prospects*. DOI tidak tersedia.

World Trade Organization. (2026). *Global trade outlook and statistics: March 2026*. DOI tidak tersedia.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 25 June 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/6a3cfdaa-6f30-83ec-b9bf-4f7011c76d65)). <https://chatgpt.com/c/6a3cfdaa-6f30-83ec-b9bf-4f7011c76d65>